

Volume: 10  
Nomor : 2  
Bulan : Mei  
Tahun : 2024

E-ISSN: 2656-940X  
P-ISSN: 2442-367X  
URL: [jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id)



## Rekomendasi dan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Zimbabwe: Tinjauan atas Sistem Pendidikan dan Tantangan yang Dihadapi

Daffa Fakhri Maulana  
Abhi Rachma Ramadhan  
Samsuri Samsuri  
Universitas Negeri Yogyakarta

Ismi Adnin  
Universitas Pendidikan Indonesia

Muhammad Lathief Dwi Putra  
Universitas Negeri Jakarta

Pos-el: [daffafakhri.2022@student.uny.ac.id](mailto:daffafakhri.2022@student.uny.ac.id)

DOI: [10.32884/ideas.v10i2.1726](https://doi.org/10.32884/ideas.v10i2.1726)

### Abstrak

Sejak merdeka, Zimbabwe mengalami krisis yang kompleks, sehingga penting bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk mengatasi tantangan tersebut, akan tetapi PKn belum diimplementasikan. Kajian ini bertujuan menjelaskan sistem politik, kebijakan PKn, serta struktur dan konten kurikulumnya di Zimbabwe. Metodenya ialah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait PKn di Zimbabwe, sedangkan data sekundernya berasal dari dokumen-dokumen dan penelitian terdahulu yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berusaha untuk memasukan PKn dalam sistem pendidikan sejak merdeka dengan membentuk *Commission of Inquiry into Education and Training* yang merekomendasikan PKn menjadi mata pelajaran tersendiri, namun belum diterapkan. Saat ini, PKn masuk dalam mata pelajaran lain, seperti IPS, agama, ilmu lingkungan, pendidikan jasmani, pendidikan HIV/AIDS, sejarah, *National and Strategic Studies*, dan *Peace, Leadership and Conflict Transformation*.

### Kata Kunci

Pendidikan kewarganegaraan, sistem politik, kebijakan pendidikan, kurikulum, Zimbabwe

### Abstract

*Since independence, Zimbabwe has experienced a complex crisis, making it crucial for Citizenship Education (PKn) to address these challenges, yet PKn has not been implemented. This study aims to describe the political system, PKn policies, as well as the structure and curriculum content in Zimbabwe. The method used is qualitative descriptive with a literature review. Primary data is obtained from books, scientific journals, and literature related to PKn in Zimbabwe, while secondary data comes from relevant documents and previous research. Research findings indicate that the government has attempted to incorporate PKn into the education system since independence by forming the Commission of Inquiry into Education and Training, which recommended PKn to become a separate subject, but has not yet been implemented. Currently, PKn is included in other subjects such as IPS, religion, environmental science, physical education, HIV/AIDS education, history, National and Strategic Studies, and*

*Peace, Leadership, and Conflict Transformation.*

### **Keywords**

*Citizenship education, political system, education policy, curriculum, Zimbabwe*

### **Pendahuluan**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya konkret untuk memperkuat multikulturalisme (Maulana dkk., 2024). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah proses menyiapkan generasi muda untuk peran dan tanggung jawabnya selaku warga negara. Seperti yang dijelaskan (Kerr, 1999), ini memuat persiapan pemuda untuk peran dan tanggung jawabnya selaku warga negara, dengan peran pendidikan sebagai bagian integral dari proses persiapan tersebut. Lebih lanjut (Nanggala & Suryadi, 2020) menjelaskan bahwa pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner terdapat pada PKn untuk menjadi strategi yang penting dalam mendukung warga negara dalam mencapai tujuan negara.

PKn bertujuan memberikan sosialisasi politik dan membekali generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berperan secara efektif di masyarakat yang demokratis (Kisby & Sloam, 2009). Sejalan dengan hal tersebut (Zulfikar & Dewi, 2021) juga menjelaskan bahwa PKn bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip demokrasi. PKn ialah isu penting di seluruh dunia dan banyak negara telah berinisiatif memperkenalkannya dalam kurikulum sekolah (Sears & Hughes, 2006a). PKn awalnya dianggap krusial karena punya peranan dalam mendidik warga suatu negara untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif secara politik, sosial, dan ekonomi (Report, 1998).

Meskipun Zimbabwe mengakui pentingnya PKn, namun penerapannya dipengaruhi oleh kompleksitas (Marovah, 2016a). Sejak kemerdekaan 1980, Zimbabwe mengalami krisis politik, sosial, dan ekonomi yang mengakibatkan ketidakpercayaan pada lingkungan politik (Hammett, 2011a). Oleh karena itu, rakyat Zimbabwe menjadi tidak percaya pada lingkungan politik karena hal tersebut. Mereka kecewa dengan sistem politik dan tidak senang dengan perkembangan ekonomi di negara tersebut (Sigauke, 2011b).

Zimbabwe telah melakukan upaya menerapkan PKn meskipun di tengah ketidakpercayaan rakyat pada negara. Bahkan sebelum merdeka, gerilyawan di kamp-kamp luar negeri mengajarkan anak-anak dan pengungsi tentang penindasan mereka dan pentingnya pengorbanan untuk tanah air. Semangat perjuangan pembebasan didorong oleh nasionalisme, kewarganegaraan, dan kesadaran identitas nasional melalui ideologi sosialis (Shizawa & Kariwo, 2011a). Setelah merdeka, PKn diperkenalkan di Zimbabwe, terutama melalui integrasi dalam kurikulum tersembunyi. Di tingkat dasar isu kewarganegaraan diajarkan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sementara di tingkat menengah diintegrasikan dalam sejarah dengan fokus pada Zimbabwe dan Afrika, memperbaiki narasi yang sebelumnya dominan oleh sejarah Eropa (Magudu, 2012a).

Zimbabwe berjuang memperkenalkan PKn ke dalam kurikulum sekolah. Gagalnya disebabkan oleh interpretasi yang berbeda antara pemerintah, guru, dan masyarakat mengenai peran PKn. Selain itu, ketidakpopuleran PKn di kalangan guru serta sensitivitas politik menghambat penerapannya. Pemerintah Zimbabwe tertutup dalam mendukung dan mempromosikan PKn, yang menyebabkan politisasi dan perdebatan sengit. Guru-guru dihambat untuk memberi perspektif alternatif karena batasan pihak berkuasa, *Zimbabwe*



*African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF)* (Shizawa & Kariwo, 2011b). Magudu (2012b) menyoroti dikotomi antara pendidikan dan indoktrinasi dalam konteks PKn di Zimbabwe (Sears & Hughes, 2006b). Mengingat juga bahwa tujuan PKn adalah agar mempunyai pemikiran yang kritis (Adnin dkk., 2024).

Pemerintah Zimbabwe harusnya tidak mempolitikasi PKn (Mavhunga dkk., 2011). Langkah tersebut memperburuk situasi, hingga terjadi persepsi negatif pada sistem sekolah dan guru sebagai alat mempertahankan status quo. Ini membatasi ruang publik dan menggerus kebebasan sipil, yang sebenarnya penting untuk partisipasi politik dan akuntabilitas pemerintah. Persepsi ini menggambarkan krisis ganda dalam kewarganegaraan dan pendidikan di Zimbabwe (Matereke, 2011a).

Beberapa penelitian melihat pentingnya PKn di Zimbabwe. Menurut Sibanda (2015a), pendidikan ini vital untuk kembali di kestabilan politik dan ekonomi negara. Zimbabwe, dulu negara yang dijajah sedang menghadapi masalah politik, sosial, dan ekonomi, perlunya PKn yang efektif mengatasi krisisnya. Shizawa & Kariwo (2011b) menekankan bahwa tanpa PKn yang memberdayakan, perubahan politik mustahil terjadi. PKn dapat memperkuat fondasi demokrasi sosial dan memupuk prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, inklusivitas, dan efektivitas. Sibanda, (2015b) juga menegaskan bahwa Zimbabwe perlu PKn untuk melatih anak muda yang bertanggung jawab, toleran, dan rasional, sesuai dengan keragaman masyarakatnya.

Berdasarkan pengalaman negara lain, PKn mampu menjadi solusi atas krisis politik, sosial, dan ekonomi. Contohnya adalah Afrika Selatan, setelah berakhirnya rezim *apartheid*, PKn memberikan dampak pada aspirasi untuk memiliki fondasi nilai-nilai pendidikan yang berfokus pada semangat nasionalisme, kesadaran politik, norma sosial, pemahaman akan hak dan tanggung jawab, serta kompetensi kewarganegaraan (Fadilah, 2018). Selain itu, Rwanda juga merupakan contoh negara yang mengalami krisis yang parah, setelah genosida tahun 1994, Rwanda menghadapi tantangan yang besar dalam membangun kembali negara dan masyarakat yang hancur. PKn menjadi salah satu instrumen utama untuk mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan kesatuan nasional di antara beragam kelompok etnis di Rwanda dengan harapan dapat mencegah terulangnya tragedi genosida yang pernah terjadi (Purdeková, 2012).

Perjalanan panjang yang dihadapi Zimbabwe terhadap perilaku warga negaranya dan kemudian proses ditanamkannya PKn ini sebagai langkah politik dalam memperkenalkan PKn itu sendiri sangat perlu untuk diteliti agar nanti kedepannya menjadi sarana pengembangan langkah kedepannya saat menghadapi hal serupa, kemudian alasan ini juga membuat penulis tertarik memahami PKn di Zimbabwe, negara yang merdeka di 1980, terus dihadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi. Meskipun PKn seharusnya menjadi solusi terhadap kondisi ini, namun pemerintah melakukan politisi terhadap upaya ini, sehingga berakibat kebijakan tidak transparan dan PKn tidak menjadi mata pelajaran terpisah. Pemerintah Zimbabwe berupaya menerapkan PKn dengan berbagai pendekatan. Diungkapkan juga masuknya hak ekonomi dan sosial ialah tahap untuk kewarganegaraan inklusif serta adil di Indonesia (Ramadhan dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini untuk bertujuan membahas sistem politik, kebijakan, struktur, dan konten kurikulum PKn di Zimbabwe.



## Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berhubungan penelitian (Adlini dkk., 2022). Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dari buku, jurnal ilmiah, serta informasi berbagai sumber kepustakaan lain berkaitan pada objek penelitian ini yakni PKn di Zimbabwe serta didukung dengan data sekunder dari dokumen yang ada misalnya dari penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dari sumber data diolah, dianalisis, dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan disusun secara logis dan sistematis hingga ada kesimpulan induktif, yaitu pendekatan dari suatu pemikiran yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Implementasi PKn di Zimbabwe menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya saat membentuk kesadaran kewarganegaraan dan partisipasi masyarakat di kehidupan demokratis. Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan PKn dalam kurikulum sekolah, politisasi dan ketidakpopuleran mata pelajaran tersebut di kalangan guru jadi kendala utama dalam penerapannya. Selain itu, adanya interpretasi yang bertentangan mengenai sifat dan peran PKn antara pemerintah, guru, dan masyarakat umum juga jadi kendala dalam mewujudkan PKn yang efektif di Zimbabwe. Meskipun ada saran untuk menjadikan PKn sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sistem pendidikan. Hal ini mengingat juga bahwa PKn mempunyai tujuan dalam membentuk warga negara menjadi baik, berpartisipasi, cerdas, mempunyai adab serta tanggung jawab yang tinggi. Namun hingga saat ini, penerapannya masih terkendala berbagai faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, beberapa studi terkait dengan PKn di Zimbabwe ditemukan. Penelitian Sigauke (2019b) menyimpulkan bahwa PKn di Zimbabwe perlu dilakukan perubahan mendasar pada konsep, persepsi, dan metode pengajaran untuk mencapai tujuan. Studi Mazembere (2018a) menyoroti perlunya ekspansi PKn demokratis di perguruan tinggi Zimbabwe untuk mendukung transformasi dan rekonstruksi sosial. Marovah (2016b) menemukan kurangnya kaitan antara nilai-nilai pengembangan manusia, kebijakan, dan praktik dalam kurikulum PKn di perguruan tinggi. Penelitian Sibanda (2015b) menekankan relevansi PKn dalam menyatukan warga Zimbabwe dari berbagai latar belakang sosial. Temuan Munikwa & Pedzisai (2013a) menunjukkan bahwa awalnya ada ketidakpastian dan keterbatasan dalam mengajar PKn, guru yang terlibat mengakui manfaatnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu nasional.

Penelitian Mavhunga dkk., (2011a) menyoroti tantangan implementasi PKn di Zimbabwe, termasuk campur tangan politik yang menghalangi upaya tersebut. Studi lain juga menunjukkan tantangan serupa dan menekankan perlunya pendekatan lebih holistik dan terintegrasi dalam mendidik warga negara yang kritis dan bertanggung jawab di Zimbabwe pasca-kemerdekaan. Penelitian Magudu (2012b) menyoroti tantangan pengajaran PKn di Zimbabwe melalui kurikulum sejarah, dipandang dengan kecurigaan sebagai upaya indoktrinasi. Sarannya yakni mendepolitisasi mata pelajaran ini dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian





Sigauke (2011a) menunjukkan motif ideologis di balik rekomendasi PKn di Zimbabwe, termasuk upaya mengendalikan dan mengalihkan kritik pada pemerintah. Penelitian Sigauke (2011b) mengungkap beragamnya pandangan guru tentang PKn, dari yang positif hingga skeptis, dengan beberapa pandangan sebagai alat indoktrinasi. Penelitian Matereke (2011b) menyoroti krisis ganda dalam pendidikan dan kewarganegaraan Zimbabwe, menekankan manipulasi pendidikan dan kewarganegaraan oleh elit politik dan butuh peran demokratis di sekolah dan institusi pendidikan tinggi.

## **Pembahasan**

### ***Sistem Politik dan Kebijakan Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan***

Zimbabwe, yang sebelumnya dikenal sebagai Rhodesia, merupakan bekas jajahan Inggris dari 1965 hingga 1979. Pada masa itu, Rhodesia terdiri dari Rhodesia Selatan dan Rhodesia Utara yang membentuk Federasi Rhodesia dan Nyasaland antara 1953 dan 1963. Pada 1979, negara ini sementara dinamai Zimbabwe-Rhodesia sebagai bagian dari kesepakatan politik (Shizawa & Kariwo (2011b).

Setelah hampir seabad di bawah kekuasaan Inggris, Zimbabwe merdeka pada 1980. Namun, pasca-kemerdekaan, negara mengalami degradasi politik, sosial, dan ekonomi akibat kebijakan represif ZANU-PF yang membatasi kebebasan berekspresi dan aktivitas berbagai kelompok (Hammett, 2011b). Dampaknya termasuk hiperinflasi, kekerasan, dan konflik politik. Reformasi sistem pendidikan menjadi prioritas, dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan mengembangkan karakter warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Sistem pendidikan yang diwarisi dari Inggris bersifat rasial dan eurosentris, membatasi akses pendidikan bagi warga Zimbabwe (Owusu-Ansah & Mungazi, 1993). Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan membatasi peran kewarganegaraan warga Afrika (Mazembere, 2018b). Reformasi pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak warga negara dan membentuk warga negara yang cerdas.

Upaya memperkenalkan PKn dalam kurikulum sekolah telah dilakukan sejak kemerdekaan. Di tingkat dasar, isu kewarganegaraan diintegrasikan dalam IPS, sementara di tingkat menengah dalam sejarah yang berfokus pada Zimbabwe dan Afrika (Magudu, 2012b). Beberapa mata pelajaran yang terkait dengan PKn, seperti pendidikan untuk kehidupan dan ekonomi politik, sempat dimasukkan namun kemudian ditarik karena kurangnya dukungan (Sigauke, 2011b).

Pada akhir 1990-an, krisis politik dan ekonomi mempercepat inisiatif PKn untuk menghasilkan warga negara yang ideal (Magudu, 2012b). Pemerintah membentuk *Commission of Inquiry into Education and Training* untuk menyelidiki dan melaporkan kondisi pendidikan dan pelatihan di negara tersebut (Nziramasanga, 1999a). Komisi ini menemukan bahwa kurangnya nilai-nilai kewarganegaraan dan etika berkontribusi pada perilaku antisosial pemuda. Oleh karena itu, komisi merekomendasikan PKn sebagai mata pelajaran independen untuk mengatasi masalah ini (Nziramasanga, 1999b).

Pemerintah Zimbabwe mulai menerapkan kebijakan tertentu berdasarkan saran komisi, termasuk memasukkan topik Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam pelajaran sejarah di

pendidikan menengah pada tahun 1999 (Magudu, 2012b). Pendidikan HIV/AIDS dan kecakapan hidup juga dimasukkan dalam kurikulum dasar pada 2003, dan *National and Strategic Studies* menjadi mata pelajaran wajib di pendidikan tinggi pada 2004 (Magudu, 2012b).

Namun, inisiatif ini mendapat kritik karena dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan pemuda dan mempertahankan kekuasaan ZANU-PF (Nyakudya, 2007). Hingga kini, PKn belum dijadikan mata pelajaran mandiri di Zimbabwe, meskipun ada berbagai upaya dan rekomendasi untuk melakukannya.

### ***Struktur dan Konten Kurikulum Kajian Pendidikan Kewarganegaraan***

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Zimbabwe didokumentasikan dalam laporan *Commission of Inquiry into Education and Training*. Komisi menegaskan bahwa PKn menjadi inti dari pembelajaran abad ke-21 karena mentransmisikan nilai-nilai kewarganegaraan dan demokrasi kepada siswa. Komisi merekomendasikan agar PKn menjadi mata pelajaran wajib di semua tingkat pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi (Nziramasanga, 1999b). Namun, penelitian menunjukkan bahwa di Zimbabwe, PKn hanya diintegrasikan sebagai tema lintas mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran terpisah seperti yang disarankan (Sigauke, 2019b).

Upaya pemerintah untuk memperkenalkan PKn sebagai mata pelajaran terpisah gagal karena ketidakpopulerannya di kalangan guru yang khawatir mengajarkan isu-isu politik yang sensitif (Sigauke, 2011b). Sebelumnya, pemerintah Zimbabwe memperkenalkan beberapa mata pelajaran terkait PKn, seperti pendidikan dengan produksi, pendidikan untuk hidup, dan ekonomi politik, untuk mendukung pembangunan negara (Zvobgo, 1999). Namun, karena kurangnya dukungan dari guru dan masalah ekonomi politik, mata pelajaran tersebut ditarik dari kurikulum.

Saat ini, PKn di Zimbabwe belum diterapkan sebagai mata pelajaran terpisah yang wajib. Di tingkat dasar, aspek PKn diintegrasikan dalam IPS, pendidikan agama dan moral, ilmu lingkungan, pendidikan jasmani, dan pendidikan HIV/AIDS, tetapi tidak diujikan secara khusus sehingga sering diabaikan (Shizawa & Kariwo, 2011b). Di tingkat menengah, PKn diintegrasikan dalam sejarah serta pendidikan agama dan moral. Fokus sejarah mencakup isu-isu HAM, demokrasi, dan konstitusi Zimbabwe serta kerjasama internasional. Pendidikan agama dan moral menekankan nilai-nilai yang membentuk kepribadian yang baik dan meningkatkan identifikasi dengan masyarakat (Shizawa & Kariwo, 2011b).

Di tingkat pendidikan tinggi, mata pelajaran wajib seperti *National and Strategic Studies* diperkenalkan pada 2004 di perguruan tinggi, dengan tema kewirausahaan, studi hukum dan parlementer, hubungan internasional, dan studi sejarah serta warisan Zimbabwe (Munikwa & Pedzisai, 2013b). Mata pelajaran ini bertujuan menumbuhkan patriotisme, mempromosikan pembangunan nasional, menggalang kerukunan nasional, dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan nasional. Program kursus wajib lainnya, seperti *Peace, Leadership and Conflict Transformation*, juga menyoroti isu-isu PKn (Sigauke, 2019b).

Program pendidikan nonformal seperti *National Youth Service*, yang dimulai pada 2001, bertujuan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial nasional, namun menyimpang dari tujuan awalnya dan digunakan sebagai alat indoktrinasi politik (ZANU-PF) (Magudu, 2012b).



Akibatnya, program ini berubah menjadi pusat militer dan propaganda partai, tetapi kemudian dihapuskan (Sibanda, 2015b).

Wacana terkait PKn di Zimbabwe sering muncul, termasuk usulan menjadikan HAM sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi gagal karena kekhawatiran guru terhadap isu-isu politik sensitif (Sigauke, 2019b). Pemerintah saat ini sedang mengidentifikasi tiga konten utama untuk kurikulum PKn: konsep *unhu/ubuntu*, nilai-nilai, dan identitas nasional (Sigauke, 2019b). Konsep *unhu/ubuntu* menekankan sifat-sifat seperti kesantunan, penghargaan untuk orang lain, disiplin, dan toleransi, sementara nilai-nilai bertindak sebagai panduan perilaku, dan identitas nasional menggugah patriotisme serta keterlibatan aktif dalam kewarganegaraan partisipatif. Sehingga, implementasi PKn yang efektif sebagai mata pelajaran mandiri sangat penting untuk mengatasi krisis politik, ekonomi, dan sosial di Zimbabwe serta membentuk karakter warga negara yang baik.

### Simpulan

Sejak kemerdekaan, telah ada berbagai upaya untuk memasukkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ke dalam sistem pendidikan Zimbabwe, namun belum berhasil. Pemerintah membentuk *Commission of Inquiry into Education and Training* yang merekomendasikan PKn sebagai mata pelajaran mandiri. Meskipun ada beberapa upaya, pemerintah Zimbabwe belum berhasil menerapkan PKn sebagai mata pelajaran tersendiri. Tantangan seperti politisasi, ketidakpopuleran di kalangan guru, serta perbedaan pandangan mengenai peran PKn antara pemerintah, guru, dan masyarakat umum menjadi hambatan utama. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Di tingkat dasar, PKn diintegrasikan dalam IPS, pendidikan agama dan moral, ilmu lingkungan, pendidikan jasmani, dan pendidikan HIV/AIDS. Di tingkat menengah, diintegrasikan dalam sejarah serta pendidikan agama dan moral. Di tingkat pendidikan tinggi, diintegrasikan dalam *National and Strategic Studies*, serta *Peace, Leadership and Conflict Transformation*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Zimbabwe segera menjadikan PKn sebagai mata pelajaran mandiri untuk mengatasi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang sedang terjadi.

### Daftar Rujukan

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Adnin, I., Sapriya, Komalasari, K., Islam, K. R., & Mubarok, M. F. (2024). Analisis Model Group Investigation Mengembangkan Berpikir Kritis Siswa Era Globalisasi pada PKn. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(1), 205-214. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1591>
- Fadilah, F. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Isu Global (HAM) di Afrika Selatan dan Hong Kong. *Journal of Moral and Civic Education*, 2(1), 8-15. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1728392&val=13639&title=Urgency%20of%20Civic%20Education%20in%20the%20Global%20Context%20Human%20Rights%20in%20South%20Africa%20and%20Hong%20Kong>



- Hammett, D. (2011a). Resistance, Power and Geopolitics in Zimbabwe. *Area*, 43(2), 202–210. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2010.00980.x>
- Hammett, D. (2011b). Resistance, Power and Geopolitics in Zimbabwe. *Area*, 43(2), 202–210. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2010.00980.x>
- Kerr, D. (1999). Citizenship Education: An International Comparison. *Qualifications and Curriculum Authority, London, April*, 1–31. [https://www.seameo.org/img/programmes\\_Projects/Competition/SEAMEOJapanESD\\_Award/2013\\_SEAMEOJapanESD\\_Award/pub/citizenship\\_no\\_intro.pdf](https://www.seameo.org/img/programmes_Projects/Competition/SEAMEOJapanESD_Award/2013_SEAMEOJapanESD_Award/pub/citizenship_no_intro.pdf)
- Kisby, B., & Sloam, J. (2009). Revitalising politics: The Role of Citizenship Education. *Representation*, 45(3), 313–324. <https://doi.org/10.1080/00344890903129582>
- Magudu, S. (2012a). Citizenship education in Zimbabwe: Challenges and Prospects. *Journal of Educational & Instructional Studies in the World*, 2(4), 179–187. <https://www.arastirmax.com/tr/publication/journal-educational-and-instructional-studies-world/2/4/citizenship-education-zimbabwe-challenges-and-prospects/arid/f152e59e-ef01-4752-afb4-4f13a184a395>
- Magudu, S. (2012b). Citizenship education in Zimbabwe: Challenges and Prospects. *Journal of Educational & Instructional Studies in the World*, 2(4), 179–187. <https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/116392/makaleler/2/4/arastirmax-citizenship-education-zimbabwe-challenges-and-prospects.pdf>
- Marovah, T. (2016a). *Citizenship Education and Human Capabilities Formation: A Case Study in Two Zimbabwean Teachers' Collages*. University of The Free State.
- Marovah, T. (2016b). *Citizenship Education and Human Capabilities Formation: A Case Study in Two Zimbabwean Teachers' Collages*. University of The Free State.
- Matereke, K. P. (2011a). “Whipping into line”: The Dual Crisis of Education and Citizenship in Postcolonial Zimbabwe. *Educational Philosophy and Theory*, 44(2), 1–16. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2011.00799.x>
- Matereke, K. P. (2011b). “Whipping Into Line”: The Dual Crisis of Education and Citizenship in Postcolonial Zimbabwe. *Educational Philosophy and Theory*, 44(2), 1–16. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2011.00799.x>
- Maulana, D. F., Wijaya, D. A. S., Agustinova, D. A., & Suharno, S. (2024). Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Multikultural: Tinjauan Praktis di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1512–1526. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6458>
- Mavhunga, P. J., Moyo, N., & Chinyani, H. (2011). Towards a Citizenship Education for Zimbabwe. *Zimbabwe Journal of Educational Research*, 24, 163-177. <https://www.ajol.info/index.php/zjer/cart/view/85804/75688>
- Mazembere, M. (2018a). *Democratic Citizenship Education in Zimbabwe's Higher Education System and its Implications for Teaching and Learning*. Stellenbosch University.
- Mazembere, M. (2018b). *Democratic Citizenship Education in Zimbabwe's Higher Education System and its Implications for Teaching and Learning*. Stellenbosch University.
- Munikwa, S., & Pedzisai, C. (2013a). Perceptions of In-Service Teachers on Learning/Teaching of Citizenship Education: A Case Study of Chinhoyi University of Technology, Mashonaland West Province, Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social*





- Science*, 3(14), 121–129. [http://ijhssnet.com/journals/vol\\_3\\_no\\_14\\_special\\_issue\\_july\\_2013/15.pdf](http://ijhssnet.com/journals/vol_3_no_14_special_issue_july_2013/15.pdf)
- Munikwa, S., & Pedzisai, C. (2013b). Perceptions of In-Service Teachers on Learning/Teaching of Citizenship Education: A Case Study of Chinhoyi University of Technology, Mashonaland West Province, Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3, 121–129. [http://ijhssnet.com/journals/vol\\_3\\_no\\_14\\_special\\_issue\\_july\\_2013/15.pdf](http://ijhssnet.com/journals/vol_3_no_14_special_issue_july_2013/15.pdf)
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 10–23. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Nyakudya, M. (2007). The Rationale for National and Strategic Studies in Teacher Training Colleges: Fostering a Sense of Patriotism in Trainee Teachers. *Zimbabwe Journal of Educational Research*, 19(2), 115–126. <https://www.africabib.org/rec.php?rid=q00043535>
- Nziramasanga, C. T. (1999a). *Zimbabwe: report of the Presidential Commission of inquiry into Education and Training*. Presidential Commission of Inquiry into Education and Training.
- Nziramasanga, C. T. (1999b). *Zimbabwe: report of the Presidential Commission of inquiry into Education and Training*. Presidential Commission of Inquiry into Education and Training.
- Owusu-Ansah, D., & Mungazi, D. A. (1993). Colonial Education for Africans: George Stark's Policy in Zimbabwe. *History of Education Quarterly*, 33(3), 404. <https://doi.org/10.2307/368208>
- Purdeková, A. (2012). Civic Education and Social Transformation in Post-Genocide Rwanda: Forging the Perfect Development Subjects. In M. Campioni & P. Noack (Eds.), *Rwanda Fast Forward* (pp. 192–209). Palgrave Macmillan.
- Ramadhan, A. R., Nuriyani, R., Arpanudin, I., Putra, M. L. D., & Adnin, I. (2024). Dinamika Kewarganegaraan Liberal: Tantangan Global dan Masa Depan Hak Asasi Manusia. *Ideas*, 10(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1589>
- Report, C. (1998). *Education For Citizenship and The Teaching of Democracy in Schools*. DfEE.
- Sears, A., & Hughes, A. (2006a). Citizenship: Education or Indoctrination. *Citizenship Teaching and Learning*, 2, 3–17.
- Sears, A., & Hughes, A. (2006b). Citizenship: Education or Indoctrination. *Citizenship Teaching and Learning*, 2, 3–17.
- Shizawa, E., & Kariwo, M. T. (2011a). Education and Development in Zimbabwe (A Social, Political and Economic Analysis). In *Education and Development in Zimbabwe*. Sense Publishers,.
- Shizawa, E., & Kariwo, M. T. (2011b). Education and Development in Zimbabwe (A Social, Political and Economic Analysis). In *Education and Development in Zimbabwe*. Sense Publishers,.
- Sibanda, P. (2015a). Citizenship Education and its Relevance to Zimbabwe. *Scientific Journal of Pure and Applied Sciences*, 4(10), 180–184. <https://doi.org/10.14196/sjpas.v4i10.1908>

- Sibanda, P. (2015b). Citizenship Education and its Relevance to Zimbabwe. *Scientific Journal of Pure and Applied Sciences*, 4(10), 180–184. <https://doi.org/10.14196/sjpas.v4i10.1908>
- Sigauke, A. T. (2011a). Political Ideas Can Only be Discussed if They Are in The Syllabus; Otherwise a Political Discussion is Not Necessary’: Teachers’ Views on Citizenship Education in Zimbabwe. *Citizenship Teaching & Learning*, 6(3), 269–285. [https://doi.org/10.1386/ctl.6.3.269\\_1](https://doi.org/10.1386/ctl.6.3.269_1)
- Sigauke, A. T. (2011b). Political Ideas Can Only be Discussed if They Are in The Syllabus; Otherwise a Political Discussion is Not Necessary’: Teachers’ Views on Citizenship Education in Zimbabwe. *Citizenship Teaching & Learning*, 6(3), 269–285. [https://doi.org/10.1386/ctl.6.3.269\\_1](https://doi.org/10.1386/ctl.6.3.269_1)
- Sigauke, A. T. (2019a). Citizenship and Citizenship Education in Zimbabwe: A Theoretical and Historical Analysis. *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, 1–16. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-67905-1\\_42-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-67905-1_42-1)
- Sigauke, A. T. (2019b). Citizenship and Citizenship Education in Zimbabwe: A Theoretical and Historical Analysis. *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, 1–16. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-67905-1\\_42-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-67905-1_42-1)
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>
- Zvobgo, R. J. (1999). *The Post Colonial State and Educational Reform: Zimbabwe, Zambia and Botswana*. Zimbabwe Publishing House.